

LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah & Provinsi Jawa Tengah
(28 Februari 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	4	0	1	3

Daily Statistic

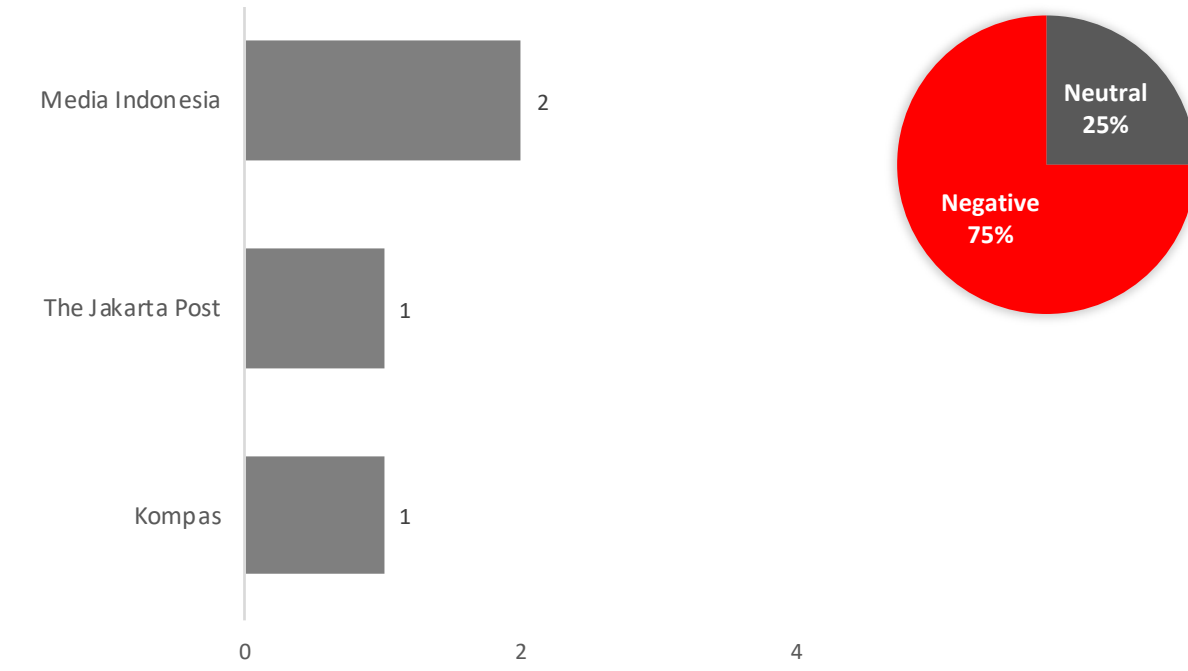


Table Of Contents : 28 Februari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	28 Februari 2025	Media Indonesia	Pemda Cari Utang Imbas Pemangkasan	8	Negative	Arief Rohman, Ahmad Syadali, Nyono
2	28 Februari 2025	Media Indonesia	PT Sritex PHK 8.475 Karyawan	11	Negative	Sumarno, Yassierli
3	28 Februari 2025	Kompas	Insiden Percikan Api di Kilang Minyak Cilacap	10	Negative	Cecep Supriatna, Ruruh Wicaksono
4	28 Februari 2025	The Jakarta Post	Minister guilty of regional poll interference	1	Neutral	Enny Nurbaningsih, Delpedro Marhaen, Prabowo Subianto

Title	Pemda Cari Utang Imbas Pemangkasan		
Media	Media Indonesia	Reporter	UL/FL/E-4
Date	2025-02-28	Tone	Negative
Page	8	PR Value	
Summary	<p>Efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan dana umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, kelabakan. Pemkab bahkan berencana mencari pinjaman untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemantauan Media Indonesia, kemarin, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora masih belum layak. Selain rusak, kondisi jalan masih berupa jalan tanah dan sebagian di antaranya belum dapat menembus desa-desa tertentu karena berada di kawasan hutan. Dampaknya membuat perekonomian di wilayah itu berjalan lambat.- Bupati Blora Arief Rohman menegaskan akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Akibat efisiensi, anggaran Pemkab Blora dipangkas Rp65 miliar. Pemkab Blora lakukan kajian untuk mencari pinjaman daerah.		

Pemda Cari Utang Imbas Pemangkasan

- Akibat efisiensi, anggaran Pemkab Blora dipangkas Rp65 miliar.
- Pemkab Blora lakukan kajian untuk mencari pinjaman daerah.
- Anggaran perjalanan dinas Pemkab Indramayu dipotong 50%.
- Pemprov Jatim tetap menggelar mudik gratis di tengah efisiensi.

AKHMAD SAFUAN
safuan@mediaindonesia.com

Efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, kelabakan. Pemkab bahkan berencana mencari pinjaman untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemantauan Media Indonesia, kemarin, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blora masih belum layak. Selain rusak, kondisi jalan masih berupa jalan tanah dan sebagian di antaranya belum dapat menembus desa-desa tertentu karena berada di kawasan hutan. Dampaknya membuat perekonomian di wilayah itu berjalan lambat.

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur,

terutama jalan, pada periode kedua kepemimpinannya saat ini setelah juga menjadi prioritas di periode kedua ini, kami masih fokus untuk perbaikan jalan hingga dapat menembus desa-desa terpencil," ujarnya.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran terutama pada DAU dan DAK hingga Rp65 miliar, berbagai upaya dilakukan agar program pembangunan infrastruktur (jalan) tetap berlanjut.

KAJIAN ANGGARAN

Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi mengaku saat ini sedang dilakukan pengkajian anggaran secara menyeluruh, terutama masalah infrastruktur, karena di satu sisi pembangunan sangat dibutuhkan dan diharapkan warga agar perekonomian berjalan. Juga di sisi lain keterbatasan anggaran menjadi kendala.

"Skema agar semua program dapat berjalan adalah mencari

pinjaman atau utang," imbuhnya. Skema mengandalkan pinjaman daerah itu, ungkap Komang, telah disetujui legislatif senilai Rp215 miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan di Blora sebanyak 41 ruas bagian dan dapat berkembang menjadi 50 ruas jalan.

PANGKAS PERJALANAN DINAS

Di Jawa Barat, guna memenuhi kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Indramayu memangkas anggaran perjalanan dinas. Pemangkasan itu diperuntukkan memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran.

"Terdapat penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab Indramayu. Yang cukup signifikan terjadi pada anggaran perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah," tutur Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, kemarin.

Pemangkasan perjalanan dinas, lanjut Syadali, mencapai 50%. Sementara itu, anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) dan sosialisasi, menurut Syadali, disesuaikan dengan prioritas tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain itu, mereka membentuk tim untuk memverifikasi jenis-jenis kegiatan yang bisa

ditoleransi menjadi bagian dari instruksi presiden.

MUDIK GRATIS

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menggelar mudik gratis di tengah penerapan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN/ABPD.

"Sekarang, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim tengah menyusun teknis pelaksanaan dan menghitung kuota untuk mudik gratis," kata Kepala Dishub Jatim Nyono di Surabaya, kemarin. Bahkan, menurut Nyono, Dinas Perhubungan Jatim akan menambah kuota mudik gratis meski kebijakan efisiensi sedang diterapkan.

Nyono mengatakan kebijakan tersebut merupakan instruksi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kepala dinas Jatim. "Volumenya (kuota mudik) akan ditambah. Nanti mendekati Lebaran dibukanya (pendaftaran)," ujar Nyono.

Menurut rencana, Dishub Jatim menyediakan 200 bus untuk mudik gratis. Armada itu diperuntukkan melayani mudik gratis antarkota dalam provinsi (AKDP) menuju 20 kabupaten/kota.

Untuk mudik gratis antarkota antarprovinsi (AKAP) dari Jakarta menuju Jatim, dipersiapkan sebanyak 50 bus. (UL/FL/E-4)

Title	PT Sritex PHK 8.475 Karyawan		
Media	Media Indonesia	Reporter	Mir/Ant/E-1
Date	2025-02-28	Tone	Negative
Page	11	PR Value	
Summary	<p>Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya memberhentikan 8.475 karyawannya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Sukoharjo menyebutkan, Sritex resmi menjatuhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ribuan karyawannya mulai 26 Februari 2025. Operasional Sritex baru tutup permanen pada Maret 2025.</p> <p>- "Meski demikian, aktivitas PHK karyawan Sritex mulai 26 Februari, tapi operasional pabrik hingga 28 Februari. Tim kurator kepailitan Sritex telah melayangkan surat resmi kepada kami. Surat berisi proses pena nganan kepailitan PT Sritex dan tiga anak perusahaannya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya," ungkap Kepala Disperinnaker Sukoharjo, Sumarno kepada wartawan, kemarin.</p>		

PT Sritex PHK 8.475 Karyawan

- PHK karyawan Sritex mulai 26 Februari, tapi operasional pabrik hingga 28 Februari.
- PT Yamaha Music Product Asia dan PT Yamaha Indonesia dikabarkan bakal PHK 1.100 pekerja.
- PT Sanken Indonesia tutup pada Juni 2025 dan mungkin PHK 400 pekerjanya.

WIDJAJADI
widjajadi@mediaindonesia.com

PERUSAHAAN raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, akhirnya memberhentikan 8.475 karyawannya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Sukoharjo menyebutkan, Sritex resmi menjatuhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ribuan karyawannya mulai 26 Februari 2025.

"Meski demikian, aktivitas

operasional Sritex baru tutup permanen pada 1 Maret 2025. Tim kurator kepailitan Sritex telah melayangkan surat resmi kepada kami. Surat berisi proses penanganan kepailitan PT Sritex dan tiga anak perusahaannya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya," ungkap Kepala Disperinnaker Sukoharjo, Sumarno, kepada wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, opsi PHK diambil oleh tim kurator kepailitan ketika bertemu manajemen Sritex selaku debitur yang sudah

dipailitkan oleh PN Niaga Semarang. Putusan itu bahkan telah berstatus inkrah setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Sritex.

"Kebijakan PHK karyawan resmi diberlakukan per 26 Februari 2025, aktivitas operasional pabrik tetap berjalan hingga 28 Februari. Jadi para pekerja masih bekerja hingga Jumat (28/2)," tegas Sumarno.

Ia menambahkan, para pekerja yang terkena PHK akan menerima uang tunai sebesar 60% dari upah maksimal selama enam bulan. Saat dihubungi, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto belum bersedia mengangkat panggilan telepon.

OPSI TERAKHIR

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendorong pengusaha agar menjadikan opsi PHK sebagai upaya terakhir. Hal itu terutama ditujukan pada indus-

tri di sektor padat karya karena memiliki banyak tenaga kerja. "Secara umum, pemerintah tidak ingin ada PHK. Itu sudah jadi komitmen pemerintah untuk tidak ada PHK," ujarnya, kemarin.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons adanya PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. PT Yamaha Music Product Asia dan PT Yamaha Indonesia, misalnya, santer dikabarkan bakal menutup pabrik dan mem-PHK 1.100 pekerja. Sebelumnya, PT Sanken Indonesia juga akan tutup pada Juni 2025 dan berpotensi melakukan PHK pada 400 pekerjanya.

"Memang sekarang kami lagi monitor semuanya supaya keinginan pemerintah itu betul-betul bisa (tanpa PHK)," jelas Faisol.

KFC EFISIENSI KARYAWAN

Selain kedua pabrik itu, PT Fast Food Indonesia atau umum dise-

but KFC juga dikabarkan melakukan efisiensi karyawan lantaran ada penurunan bisnis.

Sama seperti Faisol, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh pemberi kerja. "Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu," ujar Yassierli.

REVISI ATURAN

Di kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 menyoroti perubahan aturan terkait dengan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurut dia, pemerintah terus melakukan pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait mengenai kebijakan dan pengaturan impor.

"Bertahap dulu, ya, kita selesaikan dulu yang TPT," ujarnya, kemarin.

Revisi itu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Ia berharap revisi tersebut nantinya dapat menguntungkan para pelaku usaha Tanah Air.

"Pokoknya kita berupaya semua industri dalam negeri harus dilindungi dengan berbagai cara, termasuk kebijakan-kebijakan impor, maupun di dalam negeri," ucap Budi. (Mir/Ant/E-1)

Title	Insiden Percikan Api di Kilang Minyak Cilacap		
Media	Kompas	Reporter	XTD
Date	2025-02-28	Tone	Negative
Page	10	PR Value	
Summary	<p>Salah satu tangki milik PT Kilang Pertamina, Internasional Unit Cilacap, Jawa Tengah, dikabarkan mengalami kebakaran pada Kamis (27/2/2025) siang. Pertamina menyebut, insiden yang terjadi bukanlah kebakaran, melainkan flash atau percikan api.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut. Sebuah video yang menggambarkan adanya asap hitam membubung tinggi di sekitar tangki minyak di Pertamina Cilacap viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah di akun X @Jawa Tengah_Twit pada Kamis petang. Seseorang dalam video tersebut mengatakan, sebuah tangki di area 38 meledak.- Namun, kabar terkait kebakaran tersebut dibantah oleh Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap Cecep Supriyatna. “Bukan kebakaran ya. Jadi itu ada tangki kosong yang sudah berkerak, mau dibersihkan, tiba-tiba ada flash, nyala gitu,” ujar Cecep saat dihubungi, Kamis petang.		

KEBAKARAN

Insiden Percikan Api di Kilang Minyak Cilacap

SEMARANG, KOMPAS — Salah satu tangki milik PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap, Jawa Tengah, dikabarkan mengalami kebakaran pada Kamis (27/2/2025) siang. Pertamina menyebut, insiden yang terjadi bukanlah kebakaran, melainkan flash atau percikan api. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut.

Sebuah video yang menggambarkan adanya asap hitam membubung tinggi di sekitar tangki minyak di Pertamina Cilacap viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah di akun X @Jateng_Twit pada Kamis petang.

Seseorang dalam video tersebut mengatakan, sebuah tangki di area 38 meledak. Sejumlah warganet menduga, asap tersebut berasal dari tangki minyak yang terbakar.

Namun, kabar terkait kebakaran tersebut dibantah oleh Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap Cecep Supriyatna.

“Bukan kebakaran ya. Jadi itu ada tangki kosong yang sudah berkerak, mau dibersihkan, tiba-tiba ada flash, nyala gitu,” ujar Cecep saat dihubungi, Kamis petang.

Menurut Cecep, pembersihan tangki minyak yang sudah berkerak merupakan aktivitas yang rutin dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mem-

buang sedimen di dalam tangki.

Kebakaran sedimen tersebut bisa memengaruhi daya tampung tangki. Dengan dibersihkan, daya tampungnya kembali optimal.

Sebelum dibersihkan dari endapan, tangki minyak dikosongkan terlebih dahulu sehingga tidak ada bahan bakar di tangki tersebut. Pada insiden Kamis, api diduga membakar sludge atau kotoran minyak.

Cecep menyebut, pihaknya belum mengetahui penyebab percikan api pada Kamis. Namun, secara umum, ada *auto-ignition temperature* atau suhu swasulut dari suatu zat kimia yang memungkinkan menjadi penyebab percikan api.

“Misalnya bahan bakar terbuka, dia bisa terbakar dengan sendirinya. Kalau panasnya cukup, udaranya cukup, bahan bakarnya ada, dia akan terbakar dengan sendirinya. Itu namanya *auto-ignition*. Namun, dalam kasus ini, saya belum tahu kenapa, yang jelas tidak dengan sengaja dibakar,” ujar Cecep.

Sementara itu, Pejabat Sementara Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap Sunaryo Adi mengatakan, tim pemadam di kilang Cilacap bergerak cepat menangani kejadian ter-

sebut. Pemadaman dilakukan dengan cara menyemprot cairan berbusa (*foam*) ke tangki.

“Proses pemadaman segera dilakukan dengan penyemprotan *foam* ke tangki dari segala arah, baik untuk upaya pemadaman maupun untuk di luar tangki, dengan tujuan untuk melakukan pendinginan tangki. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat agar upaya pemadaman yang dilakukan bisa segera menangani kejadian,” kata Adi dalam keterangan tertulis.

Tak ganggu operasional

Adi menyebut, tidak ada korban yang timbul akibat kejadian tersebut, baik korban luka maupun korban jiwa. Aktivitas di kilang juga, diklaim Adi, berjalan normal. Kejadian tersebut tidak mengganggu operasional dan proses produksi bahan bakar minyak (BBM).

Dihubungi terpisah, Kepala Polresta Cilacap Komisaris Besar Ruruh Wicaksono mengatakan, insiden di kilang Pertamina Cilacap terjadi pada Kamis sekitar pukul 12.00 WIB. Kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk mencari tahu mengenai kejadian tersebut.

Menurut Ruruh, asap hitam tebal yang membubung tinggi terjadi akibat insiden tersebut. Namun, hal tersebut disebabkan tidak membuat masyarakat panik.

“Tidak ada evakuasi warga dalam kejadian itu. Posisi (lokasi) cukup jauh dari permukiman warga, sekitar 2 kilometer,” tutur Ruruh.

Kebakaran terdahulu

Dalam catatan Kompas, kebakaran pernah terjadi di area kilang PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jumat (11/6/2021) malam. Kebakaran terjadi pada tangki T-205, area 39, pukul 19.45 WIB. Tangki berisi benzena yang merupakan bahan baku pembuatan minyak mentah dan salah satu petrokimia esensial.

Setelah kebakaran, 50 personel pemadam kebakaran internal PT Pertamina dikerahkan ke lokasi. Upaya pemadaman langsung dilakukan dengan menyemprotkan *foam* pendingin ke titik api. Kobaran api bisa dikendalikan dalam waktu sekitar satu jam.

Pasokan produk BBM tidak terpengaruh dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Sebelumnya, kebakaran pernah terjadi di area kilang Pertamina pada April 2011. Saat itu, kebakaran tangki 31-T2 terjadi hingga sekitar satu pekan. Sebelumnya, pada 1995, kebakaran tangki Pertamina di Cilacap juga pernah terjadi dan butuh waktu hingga satu pekan untuk memadamkannya. Selanjutnya, kebakaran salah satu area kilang Pertamina Cilacap terjadi tahun 2016. (XTD)

Title	Minister guilty of regional poll interference		
Media	The Jakarta Post	Reporter	yer/kuk
Date	2025-02-28	Tone	Neutral
Page	1	PR Value	
Summary	<p>Critics say the previous president threw his tacit support behind Prabowo and Gibran, who is Jokowi's oldest son, ahead of the 2024 presidential election. Meanwhile, Prabowo appeared in video to declare his support for Central Java gubernatorial pair Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen ahead of voting day in November last year.</p> <p>- Prevailing laws restrict state officials, including the President, from taking a leave of absence or misusing state resources to participate in electoral campaigns. But the Election Supervisory Agency (Bawaslu) declared that Prabowo's support for Luthfi did not constitute an election violation, as the video was taken on Sunday (9/11/2024).</p>		

Minister
guilty of
regional poll
interference

The Jakarta Post

Jakarta

The administration of President Prabowo Subianto is facing growing calls from activists for the dismissal of Villages and Regional Development Minister Yandri Susanto after the Constitutional Court found him to have abused his authority to help his wife win the regional leader election in November last year.

On Monday, the court ruled in favor of the plaintiff in an election dispute challenging the victory of Yandri's wife Ratu Rachmatu Zakiyah in the Serang regent election in Banten. The plaintiff, losing candidate pair Andika Hazrumy and Nanang Supriatna, accused Ratu's camp of committing "structural, systematic and massive fraud" that helped her win the election.

In its ruling, the justices considered that Yandri was proven of "hosting and attending events in which he mobilized village heads" to support Ratu, compromising the neutrality of local officials whom the court saw as having significant roles in wooing voters in their respective villages.

Among the events mentioned by the justices was a meeting of the Serang branch of the All-Indonesian Village Administration Association (Apdesi) at a hotel in Anyer beach on Oct. 3 of last year. During the meeting, the head of Apdesi's local branch reportedly asked attendees to pledge their support for Ratu.

"It is undeniable that the actions of Yandri Susanto as [a minister] can significantly influence the attitudes of village heads who receive benefits in the form of activities and programs from the ministry," Justice Enny Nurbaniingsih said during a hearing on Monday.

The court ordered a revote within 60 days after Monday's hearing in the regental election, canceling the victory of Ratu, who ran in the regional election on the ticket of the National Mandate Party (PAN)—in which Yandri is a high-ranking official—and other parties in the ruling Onward Indonesia Coalition (KIM).

Continued on page 11

Minister guilty of regional poll interference

Continued from page 1

Human rights group Lokataru Foundation submitted a formal letter requesting that Prabowo dismiss the villages minister, citing the court ruling on the election dispute. The letter was sent through the State Secretariat on Wednesday.

"We are challenging the President [to see] whether or not he would be brave enough to fire Yandri [and] whether the President intends to clean his cabinet of violations," Lokataru executive director Delpedro Marhaen said on Wednesday.

"In his first 100 days in office, Yandri did not do his work [professionally]; he only worked to help his wife win in Banten," Delpedro continued.

The group expressed hope that Yandri could be dismissed from his ministerial seat before the revote in Serang regency in early April. Should the President fail to do so, Yandri's position as a minister could allow him to help his wife win the revote, Lokataru argued.

Following trends

While reiterating the call for Yandri's dismissal, anticorruption group Indonesia Corruption Watch (ICW) said what the minister did followed a trend set by Prabowo and former president Joko "Jokowi" Widodo.

Critics say the previous president threw his tacit support behind Prabowo and Gibran, who is Jokowi's oldest son, ahead of the 2024 presidential election. Meanwhile, Prabowo appeared in a video to declare his support for Central Java gubernatorial pair Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen ahead of voting day in November last year.

Prevailing laws restrict state officials, including the President, from taking a leave of absence or misusing state resources to participate in electoral campaigns. But the Election Supervisory Agency (Bawaslu) declared that Prabowo's support for Luthfi did not constitute an election violation, as the video was taken on a Sunday.

"The tendency for public officials to escape from consequences after committing election vio-

lations puts into question how Bawaslu monitors the election process, which allows these foul plays to occur," the ICW wrote in a statement on Thursday.

Responding to the Constitutional Court ruling, Yandri denied mobilizing village officials to help his wife win the poll: "It's too naive to link [Ratu's victory] to my influence. I was only in the office for two weeks back then."

He claimed that he was invited by village officials to the Apdesi event in Anyer Beach to talk about how Banten could be free from corruption. The event, Yandri went on to say, was held weeks before he was appointed cabinet minister by Prabowo.

"I believe and respect the people of Serang," Yandri said.

"Ratu's victory was truly the voice of the people because they no longer want corruption there."

The regional election brouhaha was not the first controversy to put Yandri in the spotlight.

Several days after his ministerial inauguration on Oct. 21, 2024, a picture of a letter bearing the Villages and Regional De-

velopment Ministry's letterhead inviting Banten local leaders to attend the second anniversary of the death of Yandri's mother went viral on social media. Netizens were quick to slam Yandri for using an official letterhead for personal events.

The minister apologized and admitted that he had made a mistake for using the ministry letterhead to invite local officials across the province to the event. (yer/kuk)